

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kualitas laporan keuangan adalah hasil akhir dari serangkaian proses akuntansi yang menghasilkan informasi keuangan yang jelas, relevan, dan dapat dipahami oleh para pengguna (Pura, 2021). Kualitas laporan keuangan merupakan aspek penting bagi keberlangsungan dan transparansi suatu organisasi. Kualitas ini tidak hanya diukur dari akurasi dan relevansi informasi yang disajikan, tetapi juga mencakup kemampuan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam pengambilan keputusan yang tepat, baik oleh manajemen internal maupun pihak eksternal.

BUMDes merupakan lembaga sosial maknanya kehadiran BUMDes diharapkan mampu menyelesaikan masalah sosial yang terjadi di desa (Sinarwati & Prayudi, 2021). Dalam organisasi milik desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), laporan keuangan berfungsi sebagai alat akuntabilitas publik atas pengelolaan dana desa yang bersumber dari anggaran negara maupun kontribusi masyarakat. Kualitas laporan keuangan ditentukan oleh beberapa karakteristik penting, seperti relevansi, keandalan, keterpahaman, dan ketepatanwaktuan penyajian informasi. Namun, untuk mewujudkan laporan keuangan berkualitas, diperlukan dukungan tata Kelola organisasi yang baik, termasuk penerapan transparansi keuangan, sistem pengendalian internal yang efektif, dan kompetensi sumber daya manusia.

Pemerintah Indonesia membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga ekonomi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Hal tersebut semakin didukung oleh pemerintah dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan. BUMDes merupakan Lembaga wirausaha sosial yang dibangun untuk mengelola potensi desa dalam meningkatkan kesejahteraan warga desa (Sinarwati dkk., 2021). Dengan meningkatnya alokasi Anggaran Belanja Negara melalui program dana desa, BUMDes memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan berbagai kegiatan yang inovatif serta produktif bagi kemajuan desa (Masdiantini dkk., 2022).

BUMDes memiliki peran strategis dalam memperkuat perekonomian lokal, meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta mendorong kemandirian desa melalui unit-unit usaha produktif. Keberhasilan BUMDes dalam menjalankan fungsinya sangat bergantung pada kualitas tata kelola, khususnya dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. BUMDes sebagai lembaga usaha yang berperan dalam mendorong

pertumbuhan ekonomi desa perlu dikelola secara optimal agar dapat menghasilkan kinerja yang baik, mampu bersaing, serta menjalankan perannya secara efektif (Dewi dkk., 2024). Meskipun BUMDes berorientasi pada aspek sosial, sebagai entitas bisnis yang memperoleh serta mengelola dana dari pemerintah melalui dana desa, BUMDes dituntut untuk Menyusun laporan keuangan yang akurat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sinarwati dkk., 2024). Meskipun demikian, berbagai kendala masih ditemukan dalam praktik pengelolaan keuangan BUMDes sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan belum optimal.

Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya transparansi keuangan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2022), transparansi mencerminkan keterbukaan organisasi dalam menyampaikan informasi terkait penggunaan sumber daya dan pengelolaan sumber daya kepada pihak yang berkepentingan. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa adalah transparan, akuntabel, dan partisipatif, yang dilaksanakan dengan anggaran yang disiplin dan teratur (Atmadja dkk., 2023). Namun, banyak pengelola BUMDes tidak menyampaikan laporan keuangan secara terbuka kepada masyarakat maupun pemerintah desa. Ketertutupan ini menciptakan ruang gelap yang memungkinkan terjadinya penyimpangan dan manipulasi data keuangan, sehingga mengurangi kepercayaan publik terhadap pengelolaan BUMDes.

BUMDes adalah salah satu lembaga keuangan mikro di tingkat desa yang berperan dalam mendukung UMKM melalui penyediaan dana dengan

akses serta prosedur yang relatif lebih mudah. Kedekatannya dengan masyarakat turut membantu pemberdayaan warga, khususnya kelompok kurang mampu, dalam meningkatkan produktivitas usaha mikro mereka (Sinarwati dkk., 2022). Dalam praktiknya, transparansi keuangan BUMDes diwujudkan melalui berbagai mekanisme keterbukaan informasi, seperti penyampaian laporan realisasi anggaran secara berkala dalam forum musyawarah desa, pemasangan papan informasi keuangan di kantor desa, publikasi laporan keuangan melalui situs desa atau media sosial resmi, serta penyediaan akses bagi masyarakat untuk meninjau dokumen pertanggungjawaban keuangan. Bentuk-bentuk transparansi ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat sebagai pemilik BUMDes dapat mengetahui bagaimana dana dikelola, sejauh mana capaian usaha, serta apakah penggunaan anggaran telah sesuai ketentuan. Ketika transparansi berjalan optimal, ruang bagi manipulasi data, penyimpangan, maupun penyalahgunaan aset menjadi lebih kecil, sehingga memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Pengendalian internal merupakan serangkaian kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Melalui system pengendalian internal yang memadai, organisasi dapat mengurangi risiko kesalahan pencatatan, penyalahgunaan asset, dan Tindakan kecurangan yang dapat merugikan organisasi.

Salah satu kasus menjadi perhatian adalah penyalahgunaan dana oleh oknum pengurus BUMDes yang memanfaatkan dana untuk kepentingan

pribadi, termasuk mengambil pinjaman atas nama orang lain. Kasus ini mencerminkan lemahnya sistem pengendalian internal dan rendahnya kompetensi pengurus dalam memahami prinsip pelaporan keuangan. Pengendalian internal yang lemah semakin memperparah potensi penyalahgunaan dana. Banyak BUMDes yang tidak memiliki prosedur baku dalam pengelolaan keuangan, tidak melakukan pencatatan transaksi secara sistematis, dan tidak menerapkan prinsip pemisahan tugas dalam organisasi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Almas (2025), dalam organisasi memerlukan pengendalian internal dalam proses yang diarahkan oleh operator dalam upaya memberikan kepercayaan untuk mencapai tujuan.

Lemahnya sistem pengendalian internal menyebabkan setiap penyimpangan, baik yang disengaja maupun tidak, tidak terdeteksi secara dini. Akibatnya, kerugian terus berlanjut dan kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes semakin menurun. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ratmasari, dkk (2021), sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Dalam penelitian Cahyani (2023), pengendalian internal mempunyai tujuan untuk menjaga aset perusahaan dari tindakan penyalahgunaan dana. Selain itu, menurut penelitian Khotimah (2025), adanya pengendalian dapat memberikan keyakinan dan kepercayaan bagi stakeholder dalam mengelola dan melaporkan pertanggungjawaban keuangan. Maka, diperlukan pengendalian internal untuk menghindari penyelewengan yang dilakukan pengelola BUMDes.

Pengendalian internal juga berperan dalam memberikan informasi yang bisa dipercaya. Pengendalian internal meyakinkan bahwa seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dapat dipatuhi dengan baik. Namun, banyak BUMDes tidak memiliki prosedur operasional standar dalam pencatatan dan pengawasan transaksi keuangan, serta tidak menerapkan prinsip pemisahan tugas yang efektif. Akibatnya, setiap bentuk penyimpangan tidak dapat terdeteksi sejak dini, dan potensi penyalahgunaan dana menjadi semakin besar.

Sumber daya BUMDes yang terdiri dari modal, ukuran angkatan kerja, dan kompetensi pekerja telah terbukti berkontribusi pada pembangunan ekonomi pedesaan (Sinarwati & Suarmanayasa, 2023). Sumber Daya Manusia mempunyai peran penting dalam mendukung kelancaran yang diperlukan oleh organisasi. Dalam penelitian yang dilakukan Hadis (2022), Sumber daya manusia dengan keterampilan dan kompetensi yang baik menjadi keunggulan kompetitif bagi suatu organisasi. Apabila potensi yang dimiliki karyawan mampu dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, maka demikian berakibat pada peningkatan produktivitas kerja.

Banyak pengurus BUMDes tidak memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan yang memadai di bidang akuntansi atau keuangan, sehingga penyusunan laporan keuangan sering tidak sesuai dengan standar akuntansi. Kondisi ini menyebabkan proses pencatatan, pengklasifikasian transaksi, dan penyusunan laporan keuangan dilakukan secara sederhana tanpa mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) maupun pedoman keuangan desa. Akibatnya, laporan keuangan yang dihasilkan cenderung

tidak lengkap, kurang akurat, tidak didukung bukti transaksi yang memadai, serta berpotensi mengandung kesalahan pencatatan. Hal ini membuat laporan yang disajikan tidak mampu menggambarkan kondisi keuangan BUMDes secara sebenarnya, sehingga menyulitkan pemerintah desa dan masyarakat dalam melakukan evaluasi kinerja maupun pengambilan keputusan berbasis data.

Kelemahan ini mengakibatkan rendahnya kualitas laporan yang dihasilkan, yang tidak hanya menghambat proses evaluasi kinerja BUMDes tetapi juga membuka peluang terjadinya kecurangan. Dalam penelitian Samsudin (2022), menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia memberikan pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian tingkat kompetensi sumber daya manusia yang didukung oleh system informasi akuntansi yang berkualitas merupakan factor penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal dan berkualitas. Penelitian oleh Fadhilah (2023), sumber daya manusia yang kurang memiliki kompetensi memadai biasanya hanya mampu menyusun pembukuan secara sederhana dan tidak menyajikan informasi yang cukup untuk mendukung pengambilan keputusan.

Fenomena ini secara nyata dapat dilihat di wilayah Bali khususnya di Kabupaten Buleleng. Buleleng merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah BUMDes terbanyak di Provinsi Bali, yaitu sebanyak 126 unit yang tersebar di sembilan kecamatan. Khusus di Kecamatan Banjar, tercatat beberapa tahun terakhir terdapat banyaknya kasus penyalahgunaan dana BUMDes dibandingkan dengan kecamatan lain yang ada di Kabupaten

Buleleng. Di Kecamatan Banjar kasus penyalahgunaan dana BUMDes terjadi di BUMDes Mekar Laba, Desa Temukus, dan BUMDes Sadu Amertha, Desa Tirtasari. Modus yang ditemukan antara lain adalah penggunaan dana tanpa pertanggungjawaban, laporan keuangan yang tidak transparan, hingga pinjaman fiktif atas nama warga desa.

Tabel 1.1

Kasus Penyalahgunaan Dana BUMDes di Kecamatan Banjar

Tahun 2021-2023

No.	Nama BUMDes	Lokasi	Dugaan Kerugian Negara
1.	BUMDes Mekar Laba	Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng	Rp 283.000.000,00 (Kompas, 2023)
2.	BUMDes Sadu Amertha	Desa Tirtasari, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng	Rp 87.000.000,00 (Antara News Bali, 2021)

Sumber: Kompas (2023), News Bali (2021).

Kasus Penyalahgunaan dana pada BUMDes juga terkonfirmasi dari segi keaktifan BUMDes. Data keaktifan pengurus BUMDes di Kecamatan Banjar sebagai berikut.

Tabel 1.2

Data Keaktifan BUMDes Di Kecamatan Banjar

No.	Nama BUM Desa	Desa	Status
1.	BUM Desa Banyu Ayu Mandara Banyuseri	Banyuseri	Aktif
2.	BUM Desa Sadu Amerta Tirtasari	Tirtasari	Aktif
3.	BUM Desa Manik Amertha Sari Kayuputih	Kayuputih	Aktif
4.	BUM Desa Tirta Amerta Banyuatis	Banyualit	Aktif
5.	BUM Desa Giri Amertha Gesing	Gesing	Aktif
6.	BUM Desa Jati Amerta Munduk	Munduk	Aktif

7.	BUM Desa Sari Amerta Gobleg	Gobleg	Aktif
8.	BUM Desa Bayu Kuwera Pedawa	Pedawa	Aktif
9.	BUM Desa Artha Sari Lestari Cempaga	Cempaga	Aktif
10.	BUM Desa Sari Sedana Sidetapa	Sidetapa	Aktif
11.	BUM Desa Adil Sejahtera Tampekan	Tampekan	Aktif
12.	BUM Desa Yasa Kerthi Banjar Tegeha	Banjar Tegeha	Aktif
13.	BUM Desa Sanjiwani Banjar	Banjar	Tidak Aktif
14.	BUM Desa Bina Usaha Mandiri Dencarik	Dencarik	Aktif
15.	BUM Desa Mekar Laba Temukus	Temukus	Aktif
16.	BUM Desa Kriya Sedana Tigawasa	Tigawasa	Aktif
17.	BUM Desa Laba Sari Lestari Kaliasem	Kaliasem	Aktif

Sumber: Data BUMDes Se-Kecamatan Banjar Seksi Pembangunan (2024).

Melihat kondisi ini, penting dilakukan evaluasi terhadap sejauh mana ketiga variabel tersebut memengaruhi kualitas laporan keuangan BUMDes, khususnya di wilayah Kecamatan Banjar. Laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan gambaran mengenai transaksi keuangan dari kegiatan operasional BUMDes yang terjadi selama periode tertentu secara relevan (Musmini dkk., 2024). Sejalan dengan studi Ratmadi (2021), sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan di lembaga perkreditan desa di Kecamatan Kubu.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu karena menggunakan variabel transparansi keuangan, alasan dipilih variabel tersebut karena transparansi keuangan dapat mendorong penyusunan laporan keuangan yang transparan, akurat dan sesuai dengan standar. Tanpa transparansi, pelaporan keuangan bisa menjadi tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Dengan adanya transparansi, masyarakat desa sebagai pemilik BUMDes dapat mengetahui bagaimana dana dikelola dan

digunakan. Ketika laporan keuangan terbuka dan dapat diakses, peluang untuk manipulasi dan penyelewengan dana menjadi lebih kecil.

Teori agensi (*agency theory*) merupakan teori utama yang digunakan dalam penelitian ini. Teori ini mencerminkan hubungan antara pihak principal dan pihak agen, didalam sebuah organisasi di mana keduanya memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Jensen dan Meckling pertama kali memperkenalkan teori agensi pada tahun 1976. BUMDes berfungsi sebagai agen dalam keagenan penelitian ini dan pada dasarnya bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan oleh *principal* yaitu desa dan masyarakat desa. Dalam posisi sebagai agen, pengelola BUMDes memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan hasil kerjanya melalui penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), sehingga laporan akuntansi yang berkualitas, disampaikan secara tepat waktu, dapat menarik minat masyarakat sebagai pemangku kepentingan dan juga pemangku kepentingan lainnya untuk menanamkan modalnya pada BUMDes. Dengan pendekatan teori agensi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis dan secara praktis.

BUMDes merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemandirian desa. Namun, permasalahan seperti rendahnya transparansi keuangan, lemahnya sistem pengendalian internal, serta minimnya kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia masih menjadi tantangan serius yang berdampak pada rendahnya kualitas pelaporan keuangan. Hal ini terbukti dari berbagai kasus

penyalahgunaan dana yang terjadi di beberapa BUMDes di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pemilihan variabel transparansi keuangan sebagai salah satu faktor utama, yang belum banyak dikaji dalam penelitian terdahulu. Penelitian ini berfokus pada BUMDes di Kecamatan Banjar sebagai objek studi, mengingat wilayah ini memiliki jumlah BUMDes yang tinggi serta kasus penyalahgunaan dana yang cukup signifikan. Penelitian ini juga dilakukan pada tempat yang berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu pada BUMDes Se-Kecamatan Banjar. Alasan peneliti memakai lokasi di Kecamatan Banjar karena dilatarbelakangi oleh permasalahan BUMDes di Kecamatan Banjar.

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan judul "Pengaruh Transparansi Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kecamatan Banjar, Buleleng".

1.2 Identifikasi Masalah

1. Dalam beberapa tahun terakhir, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) semakin menjadi sorotan publik, khususnya terkait dengan penyalahgunaan dana dan lemahnya pertanggungjawaban keuangan.
2. Berbagai kasus menunjukkan bahwa masih sering terjadi penyalahgunaan dana BUMDes, seperti penggunaan dana tanpa prosedur yang jelas, ketiadaan bukti transaksi yang memadai, hingga pengelolaan dana secara pribadi oleh pengurus.

3. Permasalahan ini diperparah dengan rendahnya tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan, yang tercermin dari minimnya pelaporan secara terbuka kepada masyarakat desa dan terbatasnya akses publik terhadap informasi keuangan.
4. Lemahnya sistem pengendalian internal seperti ketiadaan pemisahan tugas yang jelas, tidak adanya prosedur operasional standar (SOP), serta kurangnya mekanisme pengawasan atau audit internal turut memperbesar potensi penyimpangan.
5. Kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh BUMDes juga menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam hal pencatatan, penyusunan, dan pelaporan keuangan yang belum sesuai dengan prinsip akuntansi maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen, yaitu transparansi keuangan, sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia serta satu variabel dependen, yaitu kualitas laporan keuangan BUMDes. Ruang lingkup penelitian difokuskan pada BUMDes yang berada di wilayah Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih spesifik dan mendalam mengenai permasalahan yang ada di wilayah tersebut.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah transparansi keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes?
3. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh positif transparansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes.
2. Untuk mengetahui pengaruh positif sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes.
3. Untuk mengetahui pengaruh positif kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kajian ilmiah mengenai pengaruh transparansi keuangan, sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya serta menambah pemahaman mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan memperdalam pemahaman penulis mengenai pengaruh transparansi keuangan, sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes. Penelitian ini juga melatih kemampuan penulis dalam melakukan riset yang terstruktur dan mendalam.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi atau bahan kajian bagi peneliti selanjutnya. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai dasar untuk mengeksplorasi faktor-faktor lain yang memengaruhi kualitas laporan keuangan atau untuk melakukan studi lanjutan dengan ruang lingkup yang lebih luas.